

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025



bangga
melayani
bangsa

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam sistem AKIP, keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis Diskominfo 2021-2026. Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2026
Kepala Dinas,



Dr. Ir. Rudy Rinaldy, MT
Pembina Utama Madya/ (IV/d)
NIP. 19680624 199703 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel	3
Bab I Pendahuluan	5
1.1 Gambaran Organisasi.....	5
1. Dasar Pembentukan Organisasi	5
2. Tugas dan Fungsi.....	5
3. Struktur Organisasi	6
4. Sumber Daya Manusia.....	7
1.2 Aspek Strategis Organisasi	10
1.3 Permasalahan Utama Organisasi	13
Bab II Perencanaan Kinerja	17
2.1 Tujuan dan Sasaran OPD	16
2.2 Perjanjian Kinerja	19
1. Perjanjian Kinerja 2025.....	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja	22
3.1 Metodologi Pengukuran Kinerja	22
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	24
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.4 Realisasi Anggaran	63
3.5 Capaian Pelaksanaan RB General	64
Bab IV Penutup	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Upaya Perbaikan Akuntabilitas Kinerja di Masa Mendatang.....	65

DAFTAR DIAGRAM, TABEL DAN GRAFIK

Diagram 1.1 Struktur Organisasi Diskominfofik	6
Tabel 1.1 Distribusi Pegawai berdasarkan Bidang.....	7
Tabel 1.2 Distribusi Pegawai berdasarkan Jabatan dan Golongan.....	8
Tabel 1.3 Distribusi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin.....	9
Tabel 1.4 Distribusi Pegawai berdasarkan Pendidikan	10
Tabel 1.5 Hubungan Tujuan, Sasaran, Permasalahan Utama dan Akar Masalah	14
Tabel 2.1 Tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja Diskominfofik 2021-2026.....	18
Tabel 2.2 Target Perjanjian Kinerja 2025	20
Tabel 2.3 Program dan Anggaran 2025	21
Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	24
Tabel 3.2 Indikator Kinerja 2025 Sasaran 1	27
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan 2025 Sasaran 1	27
Tabel 3.4 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Sasaran 1	28
Tabel 3.5 Perbandingan Nilai SPBE Sumatera Barat dan Nasional	29
Tabel 3.6 Indikator Kinerja 2025 Sasaran 2	36
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan 2025 Sasaran 2	36
Tabel 3.8 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Sasaran 2	37
Tabel 3.9 Indikator Kinerja 2025 Sasaran 3	41
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan 2025 Sasaran 3	42
Tabel 3.11 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Sasaran 3	42
Tabel 3.12 Indikator Kinerja 2025 Sasaran 4	47
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan 2025 Sasaran 4	48
Tabel 3.14 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Sasaran 4	48
Tabel 3.15 Indikator Kinerja 2025 Sasaran 5	52

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan 2025 Sasaran 5	53
Tabel 3.17 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Sasaran 5	53
Tabel 3.18 Indikator Kinerja 2025 Sasaran 6	58
Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan 2025 Sasaran 6	58
Tabel 3.20 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Sasaran 6	59
Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025	62
Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Diskominfo 2025	63
Tabel 3.23 Realisasi Capaian RB General	64
Grafik 3.1 Tren Kenaikan Realisasi Indikator Sasaran 1	29
Grafik 3.2 Tren Kenaikan Realisasi Indikator Sasaran 2	37
Grafik 3.3 Tren Kenaikan Realisasi Indikator Sasaran 3	43
Grafik 3.4 Tren Kenaikan Realisasi Indikator Sasaran 4	49
Grafik 3.5 Tren Kenaikan Realisasi Indikator Sasaran 5	54
Grafik 3.6 Tren Kenaikan Realisasi Indikator Sasaran 6	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Organisasi

1. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian. Diskominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan mengalami perubahan terakhir melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Uraian tugas Diskominfo ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas dan fungsi Diskominfo adalah sebagai berikut:

- a. Tugas: membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik, dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- b. Fungsi:
 - Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah.
 - Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah.
 - Penyelenggaraan administrasi Dinas

- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

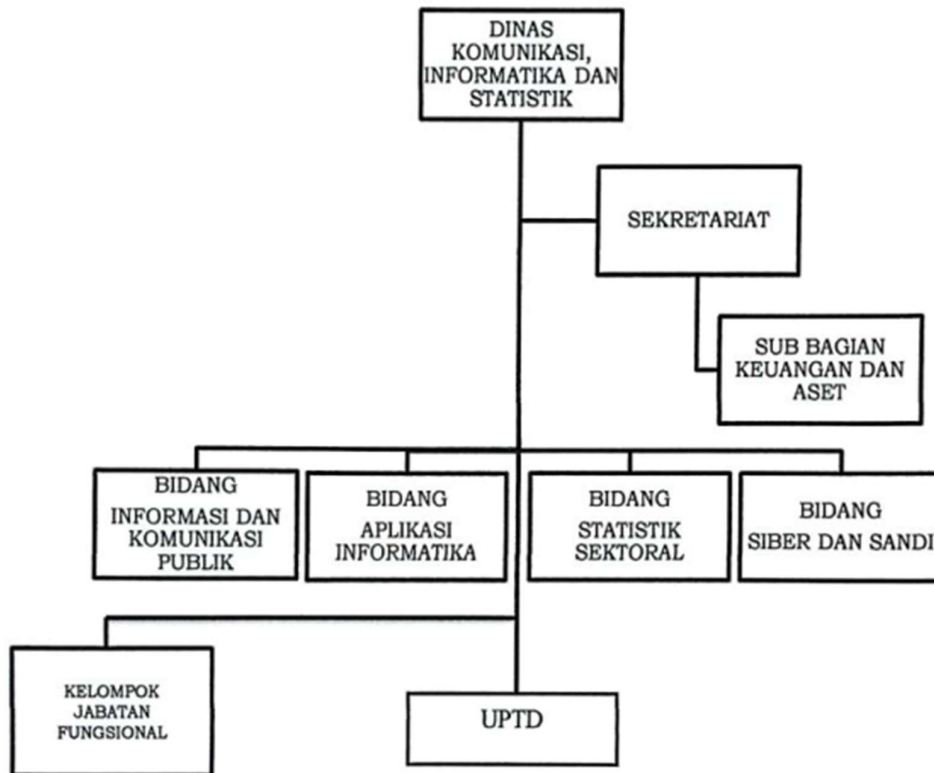
3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat terdiri atas:

- Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Keuangan dan Aset
- Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- Bidang Aplikasi Informatika
- Bidang Statistik Sektoral
- Bidang Siber dan Sandi
- UPTD
- Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Diskominfo Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Diagram I.1 Struktur Organisasi Diskominfo



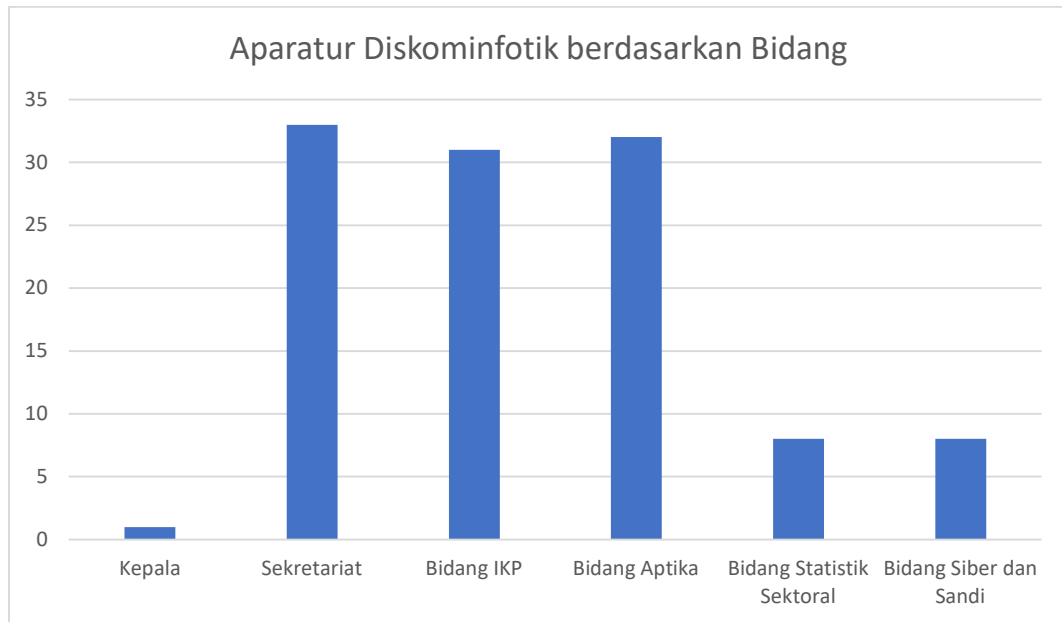
4. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Diskominfo saat ini didukung oleh personel berjumlah 113 orang dengan komposisi:

- a. Jumlah pegawai berdasarkan Bidang

Tabel I.1 Distribusi Pegawai berdasarkan Bidang

No.	Bagian / Bidang	Golongan				PPPK	PPPK-PW	Tenaga Ahli	Pegawai Outsourcing	Jumlah
		IV	III	II	I					
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-			-	1
2.	Sekretariat	2	13	-	-	-	2		16	33
3.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	6	1	-	6	2		-	16
	Komisi Informasi	-	-	-	-	-		9	6	15
4.	Bidang Aplikasi Informatika	-	13	1	-	10	8		-	32
5.	Bidang Statistik Sektoral	1	5	-	-	2			-	8
6.	Bidang Siber dan Sandi	1	4	-	-	1	2		-	8
	Jumlah	6	41	2	-	19	14	9	22	113

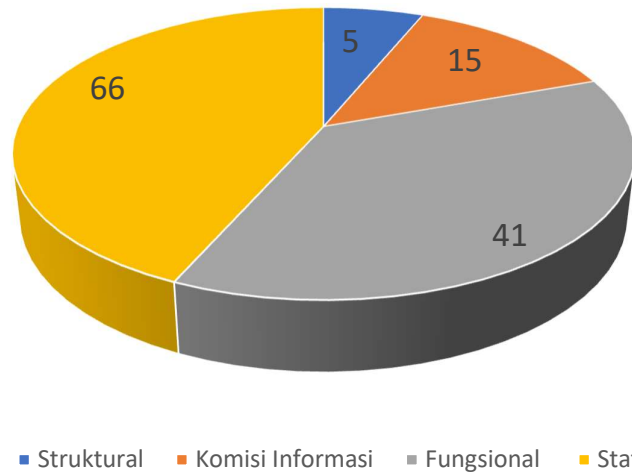


b. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan

Tabel I.2 Distribusi Pegawai berdasarkan Jabatan dan Golongan

N o.	Jabatan / Eselon	Golongan				PPPK	PPPK-PW	Tenaga Ahli	Pegawai Outsourcing	Jumlah
		IV	III	II	I					
1.	Sruktural									
	- Eselon II/a	1	-	-	-	-		-	-	1
	- Eselon III/a	4	1	-	-	-		-	-	5
	- Eselon IV/a	-	1	-	-	-		-	-	1
2.	Komisi Informasi	-	-	-	-	-		9	6	15
3.	Fungsional	-	22	1	-	19		-	-	42
4.	Staf	1	17	1	-	-	14	-	16	49
	Jumlah	6	41	2	-	19	14	9	22	113

Aparatur Diskominfo berdasarkan Jabatan

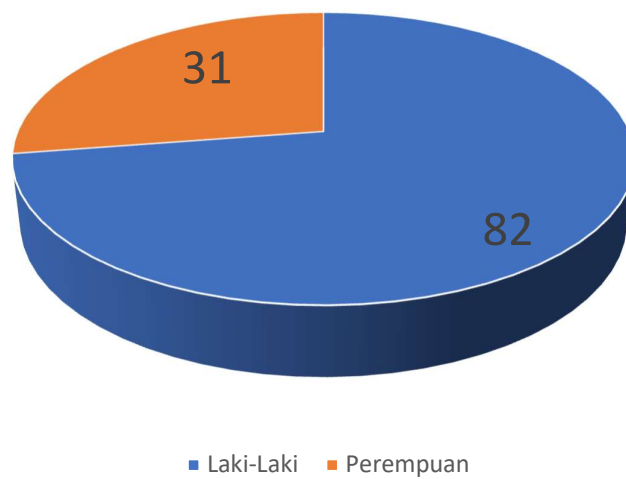


c. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

Tabel I.3 Distribusi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	82	72,57
2.	Perempuan	31	27,43
Jumlah		113	100

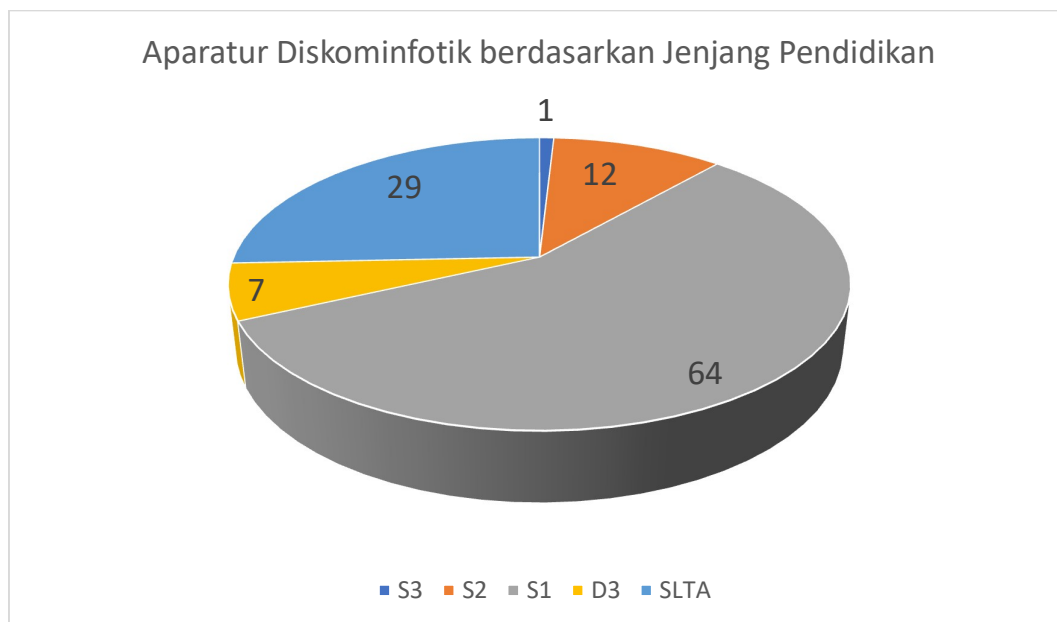
Aparatur Diskominfo Berdasarkan Jenis Kelamin



d. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Tabel I.4 Distribusi Pegawai berdasarkan Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	S3	1	0,88
2.	S2	12	10,62
3.	S1	64	56,64
4.	D3	7	6,19
5	SLTA	29	25,66
Jumlah		113	100



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa komposisi aparatur Diskominfo dari sisi jenis kelamin 72,57% adalah laki-laki dan 27,43% adalah perempuan. Dari segi pendidikan 0,88% S3, 10,62% S2, 56,64% S1, 6,18% D3, dan 25,66% SMA/SMK. Hal ini merupakan modal dasar bagi Diskominfo dalam mewujudkan target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya terkait transformasi digital, keterbukaan

informasi publik, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Peran strategis ini tercermin dalam kontribusi organisasi terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kominfo Tahun 2021–2026.

1. Mendukung Tujuan: Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Elektronik

Sebagai instansi pengampu urusan Komunikasi dan Informatika, Dinas Kominfo memegang fungsi kunci dalam mengakselerasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Melalui tugas dan fungsi yang dimiliki, organisasi memastikan penguatan tata kelola TIK, penyediaan infrastruktur digital, integrasi layanan, serta keamanan informasi pemerintah daerah.

Sesuai sasaran renstra:

a. Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi

Dinas Kominfo bertanggung jawab mengembangkan standar, arsitektur, interoperabilitas, dan layanan TIK secara terencana dan terpadu. Peran ini strategis dalam memastikan efektivitas implementasi SPBE, meningkatkan efisiensi layanan antar-OPD, serta memperkuat transformasi digital pemerintahan daerah.

b. Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)

Melalui fungsi persandian dan keamanan siber, Dinas Kominfo berperan menjaga keandalan layanan digital pemerintah dengan melakukan pengawasan keamanan informasi, deteksi insiden siber, layanan sandi, tanda tangan elektronik, serta penerapan kebijakan keamanan. Peran ini semakin penting di tengah meningkatnya ancaman keamanan siber yang berpotensi mengganggu pelayanan publik.

c. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral

Sebagai Wali Data Provinsi, Dinas Kominfo memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan Satu Data Indonesia. Penguatan kualitas data sektoral, integrasi portal data, serta pembinaan OPD produsen data menjadi fondasi penting untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Mendukung Tujuan: Meningkatnya Keterbukaan Informasi

Dinas Kominfo juga memiliki mandat strategis dalam penyebaran informasi publik, penguatan komunikasi pemerintah, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Fungsi ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan transparansi pemerintah dan penguatan hubungan pemerintah dengan masyarakat.

a. Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah

Melalui kanal informasi publik, humas pemerintah, layanan media, dan pengelolaan komunikasi publik, Dinas Kominfo memastikan masyarakat memperoleh informasi pembangunan daerah secara cepat, tepat, dan terpercaya. Dengan demikian, organisasi menjadi garda terdepan dalam memperkuat keterbukaan informasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

3. Mendukung Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Selain menjalankan fungsi teknis informatika, statistik dan komunikasi publik, Dinas Kominfo juga berperan dalam memperkuat kapasitas internal organisasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang berkinerja baik.

a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Melalui sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, serta tata kelola internal, Dinas Kominfo berperan mendukung terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan kinerja yang efektif menjadi landasan penting dalam meningkatkan kredibilitas pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran strategis organisasi.

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Sebagai penyedia layanan komunikasi publik, layanan TIK, keamanan siber, dan layanan statistik, Dinas Kominfo wajib memastikan kualitas pelayanan yang responsif, andal, dan sesuai standar. Upaya perbaikan layanan secara berkelanjutan menjadi aspek strategis untuk mendorong efisiensi proses bisnis organisasi serta meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan.

1.3. Permasalahan Utama Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait komunikasi publik, informatika, persandian, keamanan siber, dan statistik sektoral, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah permasalahan utama yang memengaruhi pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021–2026. Permasalahan tersebut berkaitan dengan implementasi SPBE, keterbukaan informasi, serta tata kelola organisasi dan pelayanan publik yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Hubungan Tujuan, Sasaran, Permasalahan Utama dan Akar Masalah

Tujuan Renstra	Sasaran	Permasalahan Utama	Akar Masalah
Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE)	Meningkatnya Tata Kelola TIK Pemerintah Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Integrasi dan standardisasi sistem informasi antar-OPD belum optimal. - Tumpang tindih pembangunan aplikasi. - Koordinasi pembangunan TIK belum efektif. - Infrastruktur TIK belum merata dan belum andal. - Kesenjangan kemampuan digital antar-OPD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penerapan arsitektur SPBE dan tata kelola TIK. - Keterbatasan regulasi teknis dan pengendalian pengembangan aplikasi. - Anggaran penguatan infrastruktur TIK tidak mencukupi. - Kapasitas SDM TIK di OPD masih beragam.
	Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	<ul style="list-style-type: none"> - Ancaman siber meningkat. - Kepatuhan standar keamanan tidak merata. - SDM keamanan siber terbatas. - Pemanfaatan TTE dan layanan sandi belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya sistem pemantauan keamanan yang terintegrasi. - Rendahnya literasi keamanan informasi di OPD. - Keterbatasan SDM tersertifikasi dan peralatan keamanan. - Masih rendahnya penerapan kebijakan keamanan informasi pada level OPD.
	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral		<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas data sektoral belum konsisten.

Tujuan Renstra	Sasaran	Permasalahan Utama	Akar Masalah
Meningkatnya Keterbukaan Informasi	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Prinsip Satu Data Indonesia belum diterapkan sepenuhnya. - Interoperabilitas dan integrasi data terbatas. - Kapasitas pengelola data OPD bervariasi. - Komunikasi publik belum adaptif terhadap isu strategis. - Distribusi informasi belum merata. - Strategi komunikasi lintas kanal belum terpadu. - Kapasitas produksi konten digital masih terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman OPD produsen data mengenai metadata standar. - Infrastruktur dan platform integrasi data belum sepenuhnya stabil. - Minimnya pelatihan teknis terkait statistik sektoral. - Keterbatasan SDM komunikasi publik di OPD. - Kurangnya pemanfaatan kanal digital berbasis analitik. - Belum adanya standar komunikasi publik terpadu antar-OPD. - Fasilitas produksi konten belum memadai.
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keselarasan perencanaan–indikator–pelaporan belum optimal. - Monitoring dan evaluasi belum konsisten. - Pemahaman SDM tentang manajemen kinerja belum merata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan indikator kinerja belum sepenuhnya berbasis hasil (outcome). - Proses Monev belum berbasis data secara optimal. - Minimnya pelatihan dan pendampingan terkait SAKIP.

Tujuan Renstra**Sasaran****Permasalahan Utama****Akar Masalah****Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi**

- SDM teknis TIK, statistik, komunikasi publik, dan keamanan siber terbatas.
 - SOP layanan belum sepenuhnya diterapkan.
 - Keterbatasan anggaran menghambat peningkatan layanan.
 - Responsivitas pelayanan masih perlu ditingkatkan.
- Ketiadaan formasi fungsional teknis yang mencukupi.
 - Belum semua layanan memiliki standar mutu yang terdokumentasi.
 - Anggaran operasional prioritas masih terbatas.
 - Beban kerja tinggi dibanding kapasitas SDM yang tersedia.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TUJUAN DAN SASARAN OPD

Pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan” yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

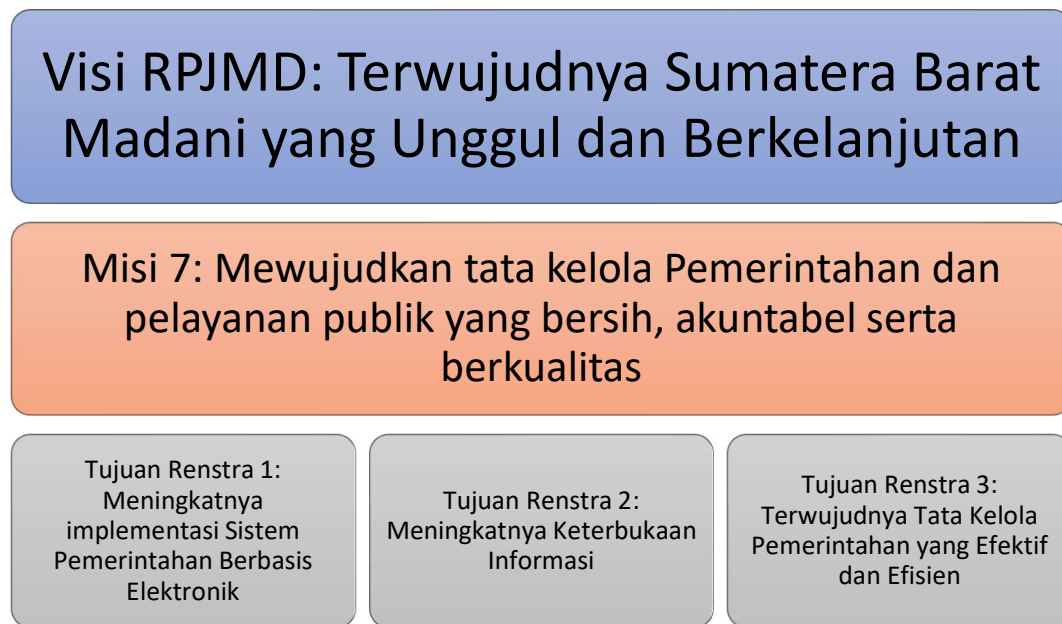
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Diskominfotik sesuai Misi pada RPJMD 2021-2026 mendukung pencapaian misi ke-7 yakni: Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas. Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Diskominfotik, ditetapkan tujuan pada Renstra Diskominfotik 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - b. Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)
 - c. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya Penyebarluasan informasi kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah
- 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Secara ringkas, misi, tujuan, dan sasaran KDH yang terkait dengan tugas dan fungsi Diskominfo dikisahkan pada diagram berikut:



Selanjutnya, tujuan Renstra dijabarkan ke dalam sasaran dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja Diskominfo 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra Tahun 20xx					
			21	22	23	24	25	26
1	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
	Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE;	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
		2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE;	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
		3. Indeks Domain Layanan SPBE;	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
			3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra Tahun 20xx					
			21	22	23	24	25	26
		4. Indeks Domain Manajemen SPBE.						
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	100	100
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (75 UKPP)	50	55	60	65	70	75
	Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	44	45	47	50	55	60
	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan	50	60	70	80	90	100
		Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan	50	60	70	80	90	100
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik*	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Penyebarluasan informasi kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah	Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi Terkait Kebijakan, Program Prioritas dan strategis Pemerintah	-	10	20	30	40	50
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B	B (64,25)	B (67)	BB (73)	BB	A
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (%)	-	85	86	87	88	89
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B	B (64,25)	B (67)	BB (73)	BB	A
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (%)	-	85	86	87	88	89

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Renstra Diskominfo Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka ditetapkanlah sasaran kinerja Diskominfo yang hendak dicapai pada tahun 2025, penetapan Perjanjian Kinerja 2025 memperhatikan realisasi capaian pada tahun 2024 (pada Pasal 10 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan SAKIP di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025, ditetapkan bahwa “target kinerja dapat ditetapkan lebih rendah/ lebih tinggi dari target jika terjadi kondisi tertentu”) sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Target Perjanjian Kinerja 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	
			PADA RENSTRA	PADA PK
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE; 2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE; 3. Indeks Domain Layanan SPBE; 4. Indeks Domain Manajemen SPBE	3,5 3,5 3,5 3,5	3,8 3,8 4,3 3
2	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	55	82
3	Meningkatnya Pemanfaatan data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan	90%	93%
		Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan	90%	91%
4	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah	Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi Terkait Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah	40%	59%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB	BB (77)
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	88%	88%

Untuk mencapai target perjanjian kinerja tersebut dilaksanakan melalui Program dengan dukungan Anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program dan Anggaran 2025

No.	Program	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	+/-
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	16.874.621.628	16.337.547.894,75	-537.073.733,25
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	5.662.353.000	5.023.368.851	-638.984.149,00
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	8.719.116.959	8.338.931.719,25	-380.185.239,75
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	212.484.000	73.539.000	-138.945.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	92.400.000	48.340.000	-44.060.000,00
JUMLAH		31.560.975.587	29.821.727.465	-1.739.248.122,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

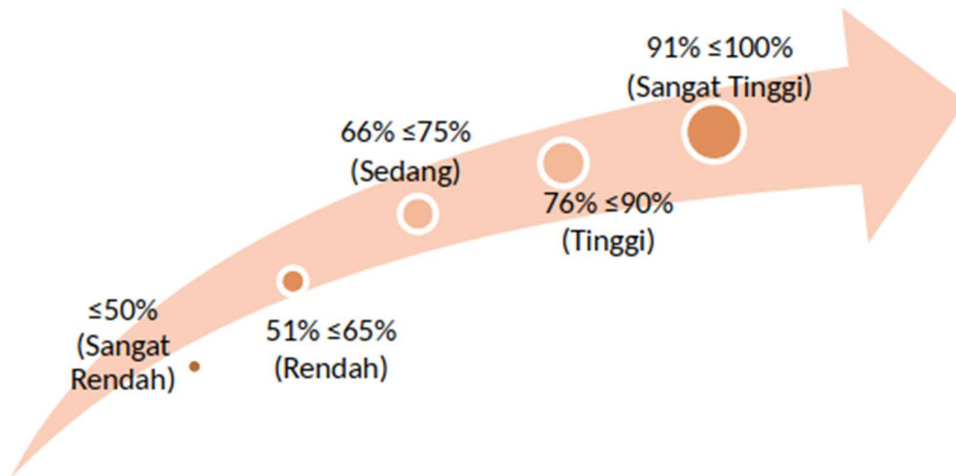
✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja dapat digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
2. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang.

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{(\text{tingkat efisiensi} \times 50)}{20}$$

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pada sub bab ini ditampilkan rekapitulasi realisasi semua indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025

Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kinerja 2025				
			Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)	
						Atas Renstra	Atas PK
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 4	8 = 6 / 5
1	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,5	3,85	3,85	110	100
	- Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE; 2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE; 3. Indeks Domain Layanan SPBE; 4. Indeks Domain Manajemen SPBE.	3,5	3,7	3,7	105,71	100
			3,5	3,8	3,8	108,57	100
			3,5	4,26	4,26	121,74	100
			3,5	2,91	2,91	83,14	100
	- Meningkatkan Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)*	55 (35)	82 (35)	56,54	102,8 (161,54)	68,95 (161,54)
	- Meningkatkan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan (%)	90	93	94,87	105,41	102,01
		Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan (%)	90	91	94,87	105,41	104,25
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	-			
	- Meningkatkan Penyebarluasan informasi kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah	Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi Terkait Kebijakan, Program Prioritas dan strategis Pemerintah (%)	40	59	63,77	159,43	108,08
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB	BB (77)	A (80,19)	-	104,14
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (%)	88	88	89	101,14	101,14
	- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB	BB (77)	A (80,19)		104,14
	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (%)	88	88	89	101,14	101,14

*) Indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI) mengalami perubahan instrumen penilaian dimana pada tahun 2023 dan 2024 menggunakan Indeks KAMI 4.2. Pada tahun 2025 pengukuran menggunakan Indeks KAMI 5.0 sesuai ISO 27001 dimana terdapat penambahan aspek penilaian terkait “Perlindungan Data Pribadi” sehingga nilai realisasi terkoreksi. Pada Periode Renstra 2025-2029, ditetapkan target indikator ini 35 sehingga persentase capaian menjadi 161,54.

3.3. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.1, berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis.

1. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi

Sasaran “*Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi*” merupakan sasaran strategis yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi sistem pemerintahan digital yang terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Peningkatan tata kelola TIK menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, aman, serta berbasis data. Sasaran ini diukur melalui empat indikator utama yang mengacu pada domain evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE, Indeks Domain Tata Kelola SPBE, Indeks Domain Layanan SPBE, dan Indeks Domain Manajemen SPBE, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif terhadap kematangan penyelenggaraan pemerintahan digital di lingkungan pemerintah daerah.

a. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE

Indikator ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah telah memiliki kelengkapan, kualitas, dan konsistensi kebijakan internal terkait penyelenggaraan SPBE. Dokumen seperti arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, kebijakan layanan digital, kebijakan keamanan informasi, serta standar operasional menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa transformasi digital berjalan berdasarkan regulasi yang jelas. Meningkatnya nilai domain ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki fondasi kebijakan yang kuat untuk mengatur arah pembangunan TIK secara terstruktur.

b. Indeks Domain Tata Kelola SPBE

Indikator ini menilai struktur organisasi, koordinasi, mekanisme pengendalian, serta proses tata kelola yang mendukung pelaksanaan SPBE. Domain ini memastikan adanya *governance framework* yang mencakup peran dan tanggung jawab pengelola TIK, forum koordinasi lintas-OPD, mekanisme monitoring dan evaluasi, serta manajemen risiko dalam penyelenggaraan SPBE. Peningkatan nilai domain ini mencerminkan semakin kuatnya tata kelola organisasi dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan digital.

c. Indeks Domain Layanan SPBE

Indikator ini mengukur kualitas, keterpaduan, dan kematangan layanan digital yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, pelaku usaha, maupun ASN. Fokus domain ini mencakup pengembangan layanan digital yang terintegrasi, penggunaan platform bersama, penyederhanaan proses bisnis, serta peningkatan aksesibilitas dan kepuasan pengguna. Peningkatan nilai domain ini menunjukkan bahwa layanan digital pemerintah semakin mudah, cepat, terpadu, dan responsif.

d. Indeks Domain Manajemen SPBE

Indikator ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mengelola aspek-aspek pendukung penyelenggaraan SPBE, seperti manajemen data, manajemen keamanan informasi, manajemen aplikasi, dan manajemen infrastruktur TIK. Semakin tinggi nilai domain ini, semakin baik kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan sistem yang andal, aman, interoperable, dan ketahanan terhadap gangguan atau serangan siber

Secara keseluruhan, keempat indikator tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan tata kelola TIK pemerintah daerah—mulai dari aspek regulasi, tata kelola organisasi, kualitas layanan digital, hingga kesiapan manajemen teknis. Peningkatan pada setiap domain SPBE akan memperkuat posisi pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, aman, dan terintegrasi. Dengan demikian, pencapaian sasaran *“Meningkatnya Tata Kelola TIK Pemerintah Daerah*

Provinsi” menjadi landasan penting untuk mempercepat transformasi digital daerah dan mendukung keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

Pada Renstra Diskominfo 2021-2026, masing-masing indeks pada tahun 2025 ditargetkan 3,5, namun untuk penetapan target 2025 disesuaikan tidak mengikuti target pada renstra karena realisasi di tahun 2024 dibanding target renstra 2025, beberapa indikator sudah melampaui target yang direncanakan pada dokumen renstra.

Indikator kinerja 2025 pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Indikator Kinerja 2025 Sasaran I

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3,7	3,7	100
2	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,8	3,8	100
3	Indeks Domain Layanan SPBE	4,26	4,26	100
4	Indeks Domain Manajemen SPBE	2,91	2,91	100

Realisasi indikator kinerja ini diukur berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2024, realisasi indikator pada sasaran ini sama dengan nilai realisasi tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan 2025 Sasaran I

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
I	Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE;	3,4	3,7	108,82	3,7	3,7	100
		2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE;	3,8	3,8	100	3,8	3,8	100
		3. Indeks Domain Layanan SPBE;	4,26	4,26	100	4,26	4,26	100
		4. Indeks Domain Manajemen SPBE.	2,6	2,91	111,92	2,91	2,91	100

Target akhir periode Renstra Diskominfo 2021-2026 untuk sasaran *Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah*

Daerah Provinsi pada keempat indikator masing-masingnya diharapkan tercapai 3,6, atau secara akumulatif masing-masing indikator adalah 20,1. Realisasi dan tingkat capaian realisasi target Renstra adalah sebagai berikut:

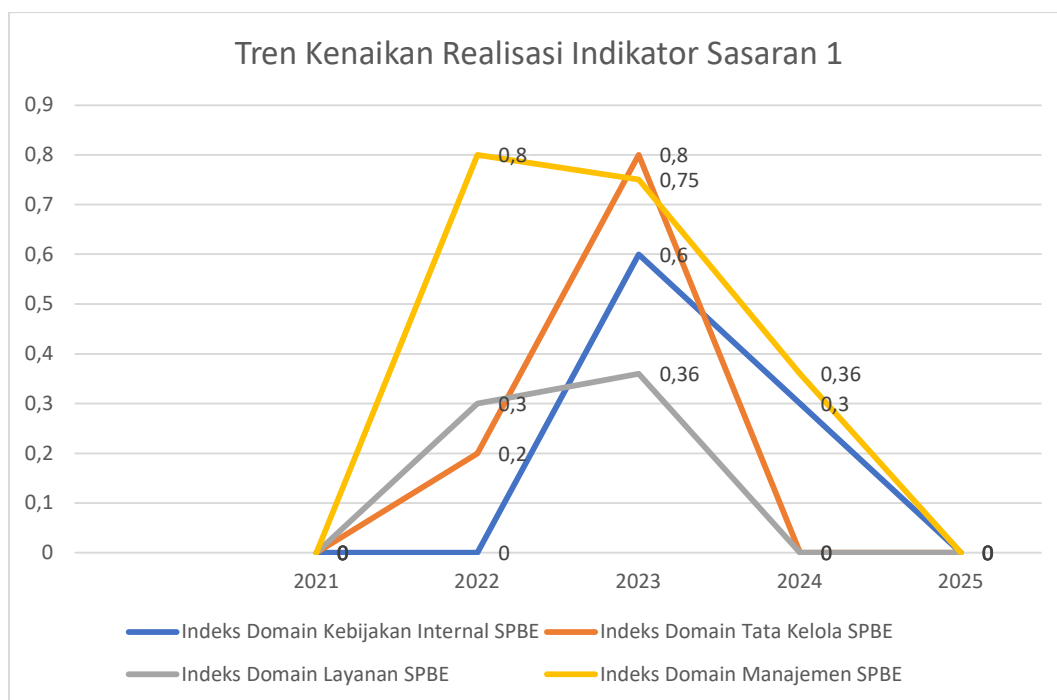
Tabel 3.4 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Sasaran I

No	Indikator	Target Capaian Renstra 2026	Realisasi					Realisasi Capaian s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =4+5+6+7+8	10=(9/3)*100%
1	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	20,1	2,8	2,8	3,4	3,7	3,7	16,4	81,59
2	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	20,1	2,8	3	3,8	3,8	3,8	17,2	85,57
3	Indeks Domain Layanan SPBE	20,1	3,6	3,9	4,26	4,26	4,26	20,28	100,9
4	Indeks Domain Manajemen SPBE	20,1	1	1,8	2,55	2,91	2,91	11,17	55,57

Berdasarkan tabel diatas, diperkirakan target akhir Renstra dapat dicapai pada tiga indikator yakni Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE, Indeks Domain Tata Kelola SPBE, Indeks Domain Layanan SPBE. Sedangkan Indeks Domain Manajemen SPBE tidak tercapai pada target akhir Renstra.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai capaian terus menunjukkan peningkatan yang fluktuatif dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,28 poin. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2023 sebesar 0,63 poin dan terendah terjadi di tahun 2025 sebesar 0 poin. Perkembangan nilai capaian keempat indikator sasaran *Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi* disajikan pada grafik berikut:

Grafik 3.1 Tren Kenaikan Realisasi Indikator Sasaran 1



Sebagai perbandingan dengan Nasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Nilai SPBE Sumatera Barat dan Nasional

No	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025	
		Nasional	Sumbar	Nasional	Sumbar	Nasional	Sumbar	Nasional	Sumbar	Nasional	Sumbar
1	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	2,21	2,8	2,39	2,8	2,91	3,4	3,36	3,7	3,36	3,7
2	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	1,89	2,8	1,85	3	2,27	3,8	2,62	3,8	2,62	3,8
3	Indeks Domain Layanan SPBE	2,81	3,6	2,97	3,9	3,45	4,26	3,78	4,26	3,78	4,26
4	Indeks Domain Manajemen SPBE	1,23	1	1,32	1,8	1,65	2,55	1,86	2,91	1,86	2,91
	Indeks SPBE	2,24	2,8	2,35	3,18	2,79	3,75	3,12	3,85	3,12	3,85

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE

a. Upaya yang telah dilakukan Diskominfo untuk meningkatkan nilai indikator ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan revisi Perda No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan SPBE menyesuaikan dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
- Berkoordinasi dengan Bappeda sebagai Koordinator Forum Satu Data untuk menyesuaikan Pergub No. 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi dengan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Menyusun Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi dengan terbitnya Pergub No. 37 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE

b. Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan nilai indikator ini antara lain:

- Revisi Perda SPBE belum bisa dilanjutkan pembahasannya, karena menunggu penerbitan Perpres tentang Pemerintah Digital

c. Untuk meningkatkan nilai indikator ini di masa yang akan datang, Diskominfo akan mengupayakan untuk:

- Menyesuaikan muatan yang diatur pada Draft revisi Perda SPBE/Pemerintah Digital dengan Perpres Pemerintah Digital
- Menyusun kebijakan internal yang merupakan turunan dari Perda SPBE/Pemerintah Digital

2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE

a. Upaya yang telah dilakukan Diskominfo untuk meningkatkan nilai indikator ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan reviu Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
- Melakukan penginputan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE pada Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE
- Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi dan data antar instansi pemerintah (pusat/daerah)

- Melakukan Pembangunan dan pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan OPD.
 - Menghubungkan Jaringan Intra Pemerintah di OPD lingkup Pemprov Sumbar.
 - Memanfaatkan Pusat Data Nasional untuk beberapa aplikasi yang dimanfaatkan di OPD
 - Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Tim Koordinasi SPBE
 - Melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Kab/Kota dalam memanfaatkan aplikasi berbagi pakai
- b. Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan nilai indikator ini antara lain:
- Untuk reviu arsitektur dan peta rencana SPBE belum optimal dilakukan karena OPD tidak memahami Proses Bisnis dan Layanan yang dilaksanakan di OPD untuk pencapaian kinerja OPD
 - Peran Tim Koordinasi SPBE belum optimal dilaksanakan
- c. Untuk meningkatkan nilai indikator ini di masa yang akan datang, Diskominfo akan mengupayakan untuk:
- Melakukan kegiatan Rapat Koordinasi secara berkala untuk menyusun Program Kerja Tim Koordinasi SPBE yang mendukung optimalisasi penyelenggaraan SPBE dan evaluasi pelaksanaan program kerja
 - Mengoptimalkan pemanfaatan SPLP untuk integrasi aplikasi
 - Melakukan Pembangunan dan pengembangan aplikasi untuk mendukung percepatan transformasi digital
 - Mengoptimalkan penggunaan Arsitektur SPBE dan Peta SPBE sebagai pedoman dalam menyusun rencana dan anggaran SPBE

3. Indeks Domain Layanan SPBE

- a. Upaya yang telah dilakukan Diskominfo untuk meningkatkan nilai indikator ini adalah sebagai berikut:
- Menyusun dan menetapkan pedoman pengendalian keamanan informasi dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat

Nomor 555-453-2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 555-997-2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tanggap Insiden Keamanan Komputer Provinsi Sumatera Barat.

- Menyusun dan menetapkan pedoman manajemen keamanan informasi dalam bentuk Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Melaksanakan audit TIK (infrastruktur dan jaringan) dengan menggunakan tools BRIN
- Melaksanakan audit keamanan TIK (infrastruktur dan aplikasi) dengan tools BSSN

b. Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan nilai indikator ini antara lain:

- Dari 8 manajemen SPBE yang menjadi indikator penilaian yang menjadi ranah/kewenangan Diskominfo ada 3 manajemen (keamanan informasi, layanan, data), 5 lainnya berada di perangkat daerah lain.
- Masih banyak manajemen SPBE yang belum memiliki pedoman pelaksanaan, sehingga pelaksanaan saat ini tanpa mengacu pada pedoman yang ditetapkan. Seperti pelaksanaan manajemen aset TIK, belum mempunyai pedoman yang mencakup proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan/penggunaan, dan penghapusan aset TIK yang menjadi penilaian indikator manajemen aset TIK.

c. Untuk meningkatkan nilai indikator ini di masa yang akan datang, Diskominfo akan mengupayakan untuk:

- Melaksanakan audit TIK (aplikasi) eksternal dengan LATIK (Lembaga Audit TIK) BRIN sebagai tindak lanjut dari audit TIK internal sebelumnya.
- Menyusun dokumen pelaksanaan manajemen SPBE yang menjadi kewenangan Diskominfo.

4. Indeks Domain Manajemen SPBE.

a. Upaya yang telah dilakukan Diskominfo untuk meningkatkan nilai indikator ini adalah sebagai berikut:

- Telah mengembangkan layanan dengan memiliki kapabilitas interaksi, transaksi, dan kolaborasi serta integrasi dengan layanan lainnya, seperti layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) telah terhubung dengan JDIH Nasional.
- Telah melakukan reviu secara berkala pada layanan-layanan.
- Beberapa layanan telah berkolaborasi dengan layanan/aplikasi lain.

b. Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan nilai indikator ini antara lain:

- Belum terdokumentasi secara lengkap pengembangan / pembaruan pada beberapa layanan berdasarkan hasil reviu.
- Beberapa layanan publik belum ada dilakukan reviu dan dokumentasi pengembangan / pembaruan layanan berdasarkan hasil reviu.

c. Untuk meningkatkan nilai indikator ini di masa yang akan datang, Diskominfo akan mengupayakan untuk:

- Melakukan reviu dan mendokumentasikan pembaruan layanan berdasarkan hasil reviu untuk peningkatan kualitas layanan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran *Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi* adalah sebesar Rp.8.338.931.719,- terealisasi sebesar Rp.7.961.713.340,- dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 95,48%. Sisa anggaran sebesar Rp.377.218.379 (4,52%) berasal dari sisa alokasi belanja barang pakai habis yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kontrak dengan pihak ketiga.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis *Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi* sebesar 100% dengan pagu dan realisasi anggaran sebesar 95,48% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 4,52%. Upaya efisiensi yang telah

dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran *Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi* antara lain pemanfaatan media teknologi komunikasi digital seperti zoom dan sebagainya dalam mengkoordinasikan pencapaian target, mengintensifkan komunikasi dengan stakeholder terkait, serta mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran.

Anggaran sebesar Rp.8.338.931.719,- berada pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan 2 kegiatan; (1) Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, dan (2) Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi. Sub kegiatan pada program ini mempunyai 2 (dua) output yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi*.

2. Sasaran Meningkatkan Keamanan Informasi (KAMI)

Sasaran "*Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)*" menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan bahwa pengelolaan data, informasi, dan layanan elektronik daerah berlangsung secara aman, terlindungi, dan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan. Keamanan informasi menjadi aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan digital karena seluruh layanan publik modern sangat bergantung pada integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Pelanggaran keamanan, baik berupa serangan siber maupun kebocoran data, tidak hanya berpotensi mengganggu pelayanan publik, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Untuk mengukur tingkat kematangan pengelolaan keamanan informasi, digunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Indeks ini merupakan instrumen penilaian yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengukur kesiapan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkungan instansi pemerintah. Pada tahun 2025, penilaian menggunakan Indeks KAMI 5.0 dimana terdapat penambahan area penilaian yakni Perlindungan Data Pribadi.

Indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI) 5.0 menilai tingkat kematangan keamanan informasi melalui enam area utama:

- a. Tata Kelola Keamanan Informasi, mencakup kebijakan, struktur organisasi, dan pengaturan kewenangan dalam pengelolaan keamanan informasi.
- b. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi, termasuk proses identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko terkait aset informasi.
- c. Kerangka Kerja Pengamanan, yang menilai kelengkapan dan efektivitas kontrol keamanan yang diterapkan pada sistem dan layanan TIK.
- d. Pengelolaan Aset Informasi, mencakup inventarisasi, klasifikasi, dan perlindungan terhadap aset informasi kritikal.
- e. Teknologi dan Keamanan Teknologi Informasi, yang mengevaluasi tingkat implementasi teknologi pengamanan, seperti enkripsi, pengendalian akses, audit log, dan mekanisme deteksi insiden.
- f. Perlindungan Data Pribadi, menilai kepatuhan dan manajemen organisasi terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi, selaras dengan UU No. 27 Tahun 2022. Fokus penilaian meliputi kebijakan privasi, kontrol akses, serta prosedur penanganan data sensitif agar terhindar dari kebocoran, kehilangan, atau pengungkapan ilegal.

Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kesiapan yang lebih baik, pengendalian yang lebih kuat, serta sikap proaktif dalam mengamankan informasi dan sistem elektroniknya.

Pada Renstra Diskominfo 2021-2026, nilai Indeks KAMI pada tahun 2025 ditargetkan 55%, namun untuk penetapan target 2025 disesuaikan tidak mengikuti target pada renstra karena realisasi di tahun 2024 dibanding target renstra 2025, indikator sudah melampaui target yang direncanakan pada dokumen renstra.

Secara keseluruhan, peningkatan Indeks KAMI mencerminkan semakin kuatnya sistem perlindungan keamanan informasi pemerintah daerah dalam menghadapi risiko digital yang berkembang. Dengan meningkatnya nilai indeks ini, pemerintah daerah lebih mampu menjaga keberlanjutan layanan elektronik, melindungi data strategis, dan mencegah dampak

negatif dari insiden siber. Pencapaian sasaran “*Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)*” menjadi komponen penting dalam memperkokoh transformasi digital daerah yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan.

Indikator kinerja 2025 pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Indikator Kinerja 2025 Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	82 (35)	56,54	68,95 (161,54)

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil *assessment* yang dilaksanakan oleh BSSN terhadap tata kelola keamanan informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Persentase nilai Indeks KAMI diperoleh dari total skor penilaian dibagi total area penilaian dikalikan 100%.

Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2024, terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan 2025 Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
II	Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	66	81,86	124,03	82 (35)	56,54	68,95 (161,54)

Target akhir periode Renstra Diskominfo 2021-2026 untuk sasaran *Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)* disesuaikan atau terkoreksi mengikuti instrumen penilaian Indeks KAMI 5.0 dan pada indikator ini diharapkan tercapai 60, atau secara akumulatif adalah 281. Realisasi dan tingkat capaian realisasi target Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Sasaran 2

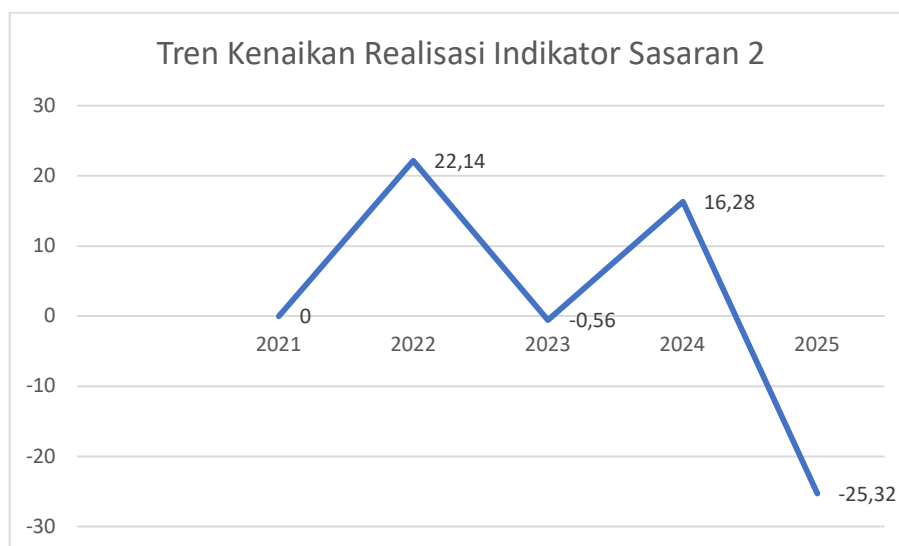
No	Indikator	Target Capaian Renstra 2026	Realisasi					Realisasi Capaian s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =4+5+6+7+8	$10=(9/3)*100\%$
1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	301	44	66,14	65,58	81,86	56,54	-	-
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)*	281	44	66,14	65,58	81,86	56,54	314,12	111,79

*) nilai dikoreksi dengan angka target pada periode renstra 2025-2029 karena adanya penyesuaian instrumen penilaian

Berdasarkan tabel diatas, diperkirakan target akhir Renstra dapat dicapai sesuai dengan rencana target yang ditetapkan.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai capaian terus menunjukkan peningkatan yang fluktuatif dengan rata-rata peningkatan sebesar 3,14 poin. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 22,14 poin dan terendah terjadi di tahun 2025 sebesar -25,32 poin. Perkembangan nilai capaian indikator sasaran *Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)* disajikan pada grafik berikut:

Grafik 3.2 Tren Kenaikan Realisasi Indikator Sasaran 2



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

a. Upaya yang telah dilakukan Diskominfo untuk meningkatkan nilai indikator ini adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan penilaian mandiri Indeks KAMI versi 5.0.
- Mengikuti asistensi dan bimbingan teknis dari BSSN.
- Melakukan inventarisasi awal aset informasi.
- Melakukan identifikasi risiko awal pada sistem elektronik yang dikelola.

b. Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan nilai indikator ini antara lain:

- Belum tersedianya pedoman teknis operasional sebagai turunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk acuan implementasi di daerah.
- Teknologi pengamanan jaringan, khususnya firewall, belum optimal dari sisi kapasitas dan fitur pengamanan lanjutan.
- Dukungan anggaran untuk peningkatan keamanan informasi tingkat lanjut
- SDM yang belum optimal menjadikan kurangnya pencatatan/log/dokumen

c. Untuk meningkatkan nilai indikator ini di masa yang akan datang, Diskominfo akan mengupayakan untuk:

- Menerapkan manajemen risiko keamanan informasi secara terstruktur dan berkelanjutan.
- Memperkuat pengelolaan aset informasi sebagai dasar pengendalian keamanan.
- Mencoba berkoordinasi ke BSSN terkait langkah strategis dalam penguatan Indeks KAMI secara menyeluruh

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran *Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)* adalah sebesar Rp.48.340.000,- terealisasi sebesar Rp.26.850.000,- dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 55,54%. Sisa anggaran sebesar Rp.21.490.000,- (44,46%) berasal dari belanja barang pakai habis yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan seperti rencana yang dilaksanakan melalui tatap muka dilaksanakan melalui zoom, dan penyesuaian jadwal dengan narasumber.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis *Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)* sebesar 161,54% dengan pagu dan realisasi anggaran sebesar 55,54% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 106%. Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran *Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)* antara lain mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran, serta koordinasi efektif dengan stakeholder terkait baik melalui tatap muka langsung maupun pemanfaatan aplikasi *online meeting*.

Anggaran sebesar Rp.48.340.000 berada pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan 2 kegiatan; (1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, dan (2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi. Sub kegiatan pada program ini mempunyai 2 (dua) output yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Keamanan Informasi*.

3. Meningkatkan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral

Sasaran "*Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral*" menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat budaya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang berbasis data. Dalam era transformasi digital dan kebijakan Satu Data Indonesia, ketersediaan data yang valid, mutakhir, terstandar, dan mudah diakses menjadi landasan penting bagi seluruh perangkat daerah dalam menghasilkan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Pemanfaatan data statistik sektoral tidak hanya meningkatkan kualitas dokumen

perencanaan, tetapi juga memastikan bahwa proses evaluasi pembangunan dilakukan secara objektif dan terukur.

Untuk mengukur sejauh mana data statistik digunakan dalam pengambilan keputusan oleh perangkat daerah, digunakan dua indikator utama sebagai berikut:

a. Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan

Indikator ini mengukur proporsi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja, RKPD, serta dokumen perencanaan program dan kegiatan lainnya. Pemanfaatan data statistik dalam perencanaan mencerminkan kemampuan OPD dalam:

- mengidentifikasi permasalahan berdasarkan data faktual,
- menetapkan target yang realistis dan terukur,
- melakukan analisis kebutuhan berbasis data sektoral,
- memastikan keselarasan antara perencanaan dan kondisi riil pembangunan.

Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin kuat pula fondasi *evidence-based planning* di lingkungan pemerintah daerah.

b. Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan

Indikator ini menilai jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja program dan kegiatan, termasuk dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP), evaluasi renja, maupun evaluasi capaian RPJMD.

Pemanfaatan data statistik dalam evaluasi pembangunan menunjukkan bahwa OPD telah:

- mengukur capaian indikator secara objektif,
- membandingkan capaian dengan target menggunakan data yang kredibel,
- melakukan analisis efektivitas program berdasarkan data sektoral,

- menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti empiris.

Peningkatan persentase OPD pada indikator ini mencerminkan penguatan budaya evaluasi yang lebih akuntabel dan berbasis bukti.

Secara keseluruhan, kedua indikator tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat kematangan pemerintah daerah dalam memanfaatkan data statistik sektoral. Dengan meningkatnya penggunaan data dalam perencanaan dan evaluasi, proses pembangunan akan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan transparan. Pencapaian sasaran *“Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral”* sekaligus memperkuat pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia dan mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang berbasis bukti serta akuntabilitas kinerja yang tinggi.

Pada Renstra Diskominfo 2021-2026, kedua nilai indikator pada tahun 2025 ditargetkan masing-masingnya 90%, namun untuk penetapan target 2025 disesuaikan tidak mengikuti target pada renstra karena realisasi di tahun 2024 dibanding target renstra 2025, kedua indikator sudah melampaui target yang direncanakan pada dokumen renstra.

Indikator kinerja 2025 pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Indikator Kinerja 2025 Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan	93	94,87	102,01
2	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan	91	94,87	104,25

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Diskominfo terhadap penyelenggaraan pemanfaatan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan di OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Persentase diperoleh dari jumlah OPD yang menggunakan data statistik baik dalam penyusunan perencanaan maupun dalam evaluasi kinerja dibagi total jumlah OPD dikalikan 100%.

Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2024, terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan 2025 Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
III	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	1. Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan	80	92,16	115,2	93	94,87	102,01
		2. Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan	81	90,2	111,36	91	94,87	104,25

Target akhir periode Renstra Diskominfo 2021-2026 untuk sasaran *Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral* pada kedua indikator ini diharapkan tercapai 100, atau secara akumulatif masing-masing indikator adalah 450. Realisasi dan tingkat capaian realisasi target Renstra adalah sebagai berikut:

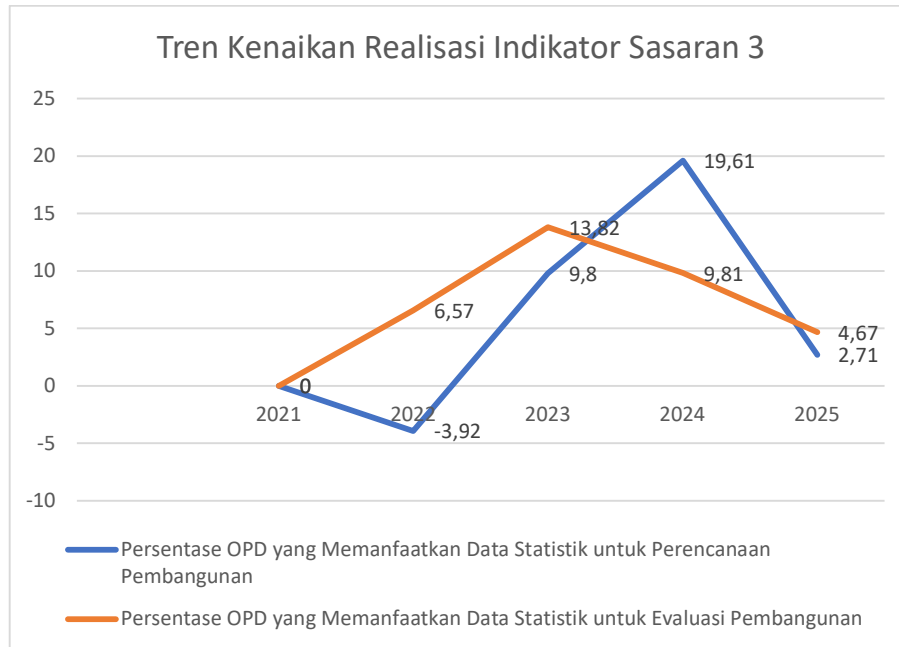
Tabel 3.11 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Sasaran 3

No	Indikator	Target Capaian Renstra 2026	Realisasi					Realisasi Capaian s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$10=(9/3)*100%$ $=4+5+6+7+8$
1	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan	450	66,67	62,75	72,55	92,16	94,87	389	86,44
2	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan	450	60	66,57	80,39	90,2	94,87	392,03	87,12

Berdasarkan tabel diatas, diperkirakan target akhir Renstra dapat dicapai sesuai dengan rencana target yang ditetapkan.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai capaian terus menunjukkan peningkatan yang fluktuatif dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,88 poin. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2024 sebesar 14,71 poin dan terendah terjadi di tahun 2022 sebesar 1,33 poin. Perkembangan nilai capaian kedua indikator sasaran *Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral* disajikan pada grafik berikut:

Grafik 3.3 Tren Kenaikan Realisasi Indikator Sasaran 3



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan
 - a. Upaya yang telah dilakukan Diskominfo untuk meningkatkan nilai indikator ini adalah sebagai berikut:
 - Dalam rangka meningkatkan Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan, Diskominfo telah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada OPD serta mengoptimalkan peran sebagai Wali Data melalui penguatan portal data, penyusunan metadata, dan koordinasi lintas perangkat daerah. Upaya tersebut mendorong meningkatnya pemanfaatan

data statistik sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah berbasis data.

b. Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan nilai indikator ini antara lain:

- Dalam upaya meningkatkan Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan, Diskominfo masih menghadapi beberapa hambatan. Permasalahan yang dihadapi antara lain belum meratanya pemahaman OPD terhadap pentingnya data statistik sebagai dasar perencanaan, serta kualitas dan ketersediaan data sektoral yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip akurat, mutakhir, dan terstandar.
- Selain itu, keterbatasan kapasitas SDM pengelola data di OPD serta belum optimalnya integrasi dan pemanfaatan portal data menyebabkan data statistik belum dimanfaatkan secara maksimal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

c. Untuk meningkatkan nilai indikator ini di masa yang akan datang, Diskominfo akan mengupayakan untuk:

- Untuk meningkatkan nilai indikator Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan di masa yang akan datang, Diskominfo akan mengupayakan penguatan peran sebagai Wali Data melalui peningkatan kualitas dan keterpaduan data statistik sektoral, pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola data di OPD, serta optimalisasi pemanfaatan portal data daerah. Selain itu, Diskominfo akan mendorong penggunaan data statistik secara konsisten dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan perencanaan yang berbasis data dan eviden.

2. Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan

a. Upaya yang telah dilakukan Diskominfo untuk meningkatkan nilai indikator ini adalah sebagai berikut:

- Dalam rangka meningkatkan Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan, Diskominfo telah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada OPD serta mengoptimalkan peran sebagai Wali Data melalui penguatan kualitas dan keterpaduan data statistik. Upaya tersebut mendorong pemanfaatan data statistik sebagai dasar evaluasi pembangunan yang lebih objektif dan berbasis data.
- b. Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan nilai indikator ini antara lain:
- Dalam upaya meningkatkan Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan, Diskominfo masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam proses monitoring dan evaluasi di OPD, serta kualitas dan konsistensi data sektoral yang belum sepenuhnya memenuhi standar akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
 - Selain itu, keterbatasan kapasitas SDM pengelola data serta belum meratanya pemahaman OPD mengenai pentingnya data statistik sebagai dasar evaluasi pembangunan turut mempengaruhi rendahnya tingkat pemanfaatan data secara optimal.
- c. Untuk meningkatkan nilai indikator ini di masa yang akan datang, Diskominfo akan mengupayakan untuk:
- Untuk meningkatkan nilai indikator Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan di masa yang akan datang, Diskominfo akan mengupayakan penguatan peran sebagai Wali Data melalui peningkatan kualitas, konsistensi, dan keterpaduan data statistik sektoral, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola data di OPD. Selain itu, Diskominfo akan mendorong pemanfaatan data statistik secara lebih sistematis dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan agar proses evaluasi kinerja daerah semakin objektif dan berbasis data.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran *Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral* adalah sebesar

Rp.73.539.000,- terealisasi sebesar Rp.63.419.000,- dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 86,24%. Sisa anggaran sebesar Rp.10.120.000,- (13,76%) berasal dari belanja barang pakai habis yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan seperti alokasi makan minum dan narasumber.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis *Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral* sebesar 103,13% dengan pagu dan realisasi anggaran sebesar Rp.86,24% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 16,89%. Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran *Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral* antara lain mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran, serta koordinasi efektif dengan stakeholder terkait baik melalui tatap muka langsung maupun pemanfaatan aplikasi *online meeting*.

Anggaran sebesar Rp.73.539.000,- berada pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral kegiatan; Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi. Sub kegiatan pada program ini mempunyai 2 (dua) output yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral*.

4. Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program prioritas, dan langkah strategis Pemerintah Daerah dapat dipahami, diakses, dan diterima oleh masyarakat secara luas melalui berbagai kanal komunikasi publik. Penyebarluasan informasi pemerintah merupakan fungsi strategis Diskominfo untuk menjembatani komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas proses diseminasi informasi yang dilakukan oleh Diskominfo, baik melalui media digital, media sosial, media massa, kanal komunikasi resmi pemerintah, maupun kegiatan publikasi tatap muka. Indikator ini memberikan gambaran tingkat

jangkauan (*reach*) dan keterpaparan (*exposure*) masyarakat terhadap informasi strategis pemerintah.

Peningkatan nilai indikator ini mencerminkan semakin baiknya kapasitas komunikasi pemerintah dalam menyampaikan informasi yang relevan, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, peningkatan indikator ini menunjukkan keberhasilan upaya Diskominfo dalam memperluas distribusi informasi melalui strategi multiplatform, integrasi konten lintas perangkat daerah, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas konten publikasi.

Hasil pengukuran indikator ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi efektivitas strategi komunikasi publik, perbaikan metode penyebaran informasi, optimalisasi penggunaan media digital, serta peningkatan partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, indikator ini menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan fungsi komunikasi publik sebagai pilar transparansi dan keterbukaan informasi pemerintah daerah.

Pada Renstra Diskominfo 2021-2026, nilai indikator pada tahun 2025 ditargetkan 40%, namun untuk penetapan target 2025 disesuaikan tidak mengikuti target pada renstra karena realisasi di tahun 2024 dibanding target renstra 2025, indikator ini sudah melampaui target yang direncanakan pada dokumen renstra.

Indikator kinerja 2025 pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Indikator Kinerja 2025 Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi terkait Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah	59	63,77	108,08

Secara operasional, indikator ini diukur melalui survei kepada masyarakat, yang menanyakan apakah mereka mengetahui dan menerima informasi mengenai kebijakan atau program pemerintah dalam periode tertentu. Persentase diperoleh dari perbandingan jumlah responden yang menerima informasi terhadap total responden survei.

Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2024, terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan 2025 Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IV	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah	Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi Terkait Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah	38,37	58,58	152,67	59	63,77	108,08

Target akhir periode Renstra Diskominfo 2021-2026 untuk sasaran *Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah* pada indikator ini diharapkan tercapai 50, atau secara akumulatif adalah 150. Realisasi dan tingkat capaian realisasi target Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Sasaran 4

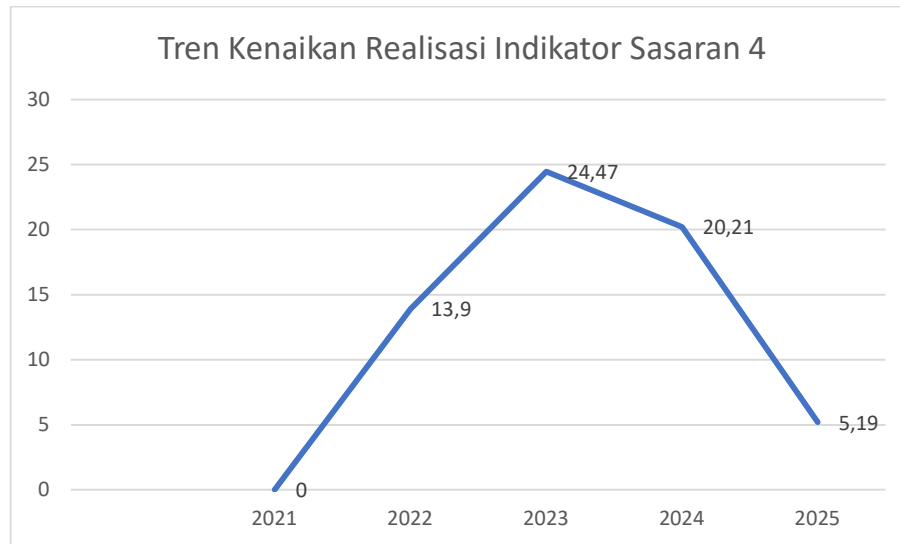
No	Indikator	Target Capaian Renstra 2026	Realisasi					Realisasi Capaian s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$10=(9/3)*100%$ $=4+5+6+7+8$
1	Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi Terkait Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah	150	-	13,9	38,37	58,58	63,77	174,62	116,41

Berdasarkan tabel diatas, diperkirakan target akhir Renstra dapat dicapai sesuai dengan rencana target yang ditetapkan.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai capaian terus menunjukkan peningkatan yang fluktuatif dengan rata-rata peningkatan sebesar 15,94 poin. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2023 sebesar 24,27 poin dan

terendah terjadi di tahun 2025 sebesar 5,19 poin Perkembangan nilai capaian indikator sasaran *Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah* disajikan pada grafik berikut:

Grafik 3.4 Tren Kenaikan Realisasi Indikator Sasaran 4



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi Terkait Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah

a. Upaya yang telah dilakukan Diskominfo untuk meningkatkan nilai indikator ini adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah melalui berbagai kanal komunikasi resmi, baik media digital (website resmi pemerintah daerah, media sosial, dan aplikasi layanan publik) maupun media konvensional (siaran radio, baliho, spanduk, dan publikasi cetak).
- Mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam penyediaan informasi publik yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Menjalin kerja sama dengan media lokal dalam rangka memperluas jangkauan penyebarluasan informasi pemerintah.

- Melakukan peliputan dan publikasi kegiatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara rutin dan terstruktur.
 - Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan kebijakan kepada masyarakat, termasuk melalui konten audio visual dan narasi yang lebih komunikatif
- b. Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan nilai indikator ini antara lain:
- Tingkat literasi informasi dan literasi digital masyarakat yang belum merata, sehingga tidak seluruh lapisan masyarakat mampu mengakses dan memahami informasi yang disampaikan melalui media digital.
 - Keterbatasan jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di beberapa wilayah, khususnya daerah terpencil dan blank spot.
 - Belum optimalnya segmentasi sasaran informasi, sehingga pesan kebijakan belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik kelompok masyarakat tertentu.
 - Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis di bidang komunikasi publik dan pengelolaan konten.
 - Tingginya arus informasi dari berbagai sumber non-resmi yang berpotensi mengaburkan pesan kebijakan pemerintah.
- c. Untuk meningkatkan nilai indikator ini di masa yang akan datang, Diskominfo akan mengupayakan untuk:
- Meningkatkan kualitas strategi komunikasi publik dengan pendekatan berbasis data dan segmentasi audiens, sehingga informasi kebijakan dapat disampaikan secara lebih tepat sasaran.
 - Memperkuat kolaborasi dengan perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, komunitas lokal, serta tokoh masyarakat sebagai simpul penyebaran informasi.

- Mengembangkan konten informasi yang lebih inklusif, sederhana, dan mudah dipahami, termasuk penggunaan infografik, video singkat, dan bahasa lokal.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan komunikasi publik, jurnalistik pemerintah, dan pengelolaan media digital.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran *Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah* adalah sebesar Rp.5.023.368.851,- terealisasi sebesar Rp.4.572.044.594,- dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 91,02%. Sisa anggaran sebesar Rp.451.324.257,- (8,98%) berasal dari belanja barang pakai habis yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan seperti alokasi makan minum dan honor narasumber.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis *Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah* sebesar 108,08% dengan pagu dan realisasi anggaran sebesar 91,02% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 17,06%. Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran *Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah* antara lain mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran, serta koordinasi efektif dengan stakeholder terkait baik melalui tatap muka langsung maupun pemanfaatan aplikasi *online meeting*.

Anggaran sebesar Rp.5.023.368.851,- berada pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik kegiatan; Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi. Sub kegiatan pada program ini mempunyai 1 (satu) output yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah*.

5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang memiliki sistem akuntabilitas kinerja yang kuat, transparan, dan

berorientasi pada hasil. Akuntabilitas kinerja tidak hanya mencerminkan kemampuan organisasi dalam merencanakan dan melaksanakan program secara efektif, tetapi juga menunjukkan komitmen organisasi dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran serta capaian kinerja kepada publik dan pemangku kepentingan.

Peningkatan nilai indikator ini mencerminkan semakin baiknya kualitas tata kelola kinerja dalam tubuh organisasi, termasuk peningkatan integrasi perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara tujuan-sasaran-program, serta kemampuan organisasi dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator ini juga menunjukkan sejauh mana budaya kinerja telah tertanam di dalam organisasi melalui penguatan peran pimpinan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengembangan sistem pelaporan kinerja yang lebih akurat dan berbasis data.

Secara strategis, nilai akuntabilitas kinerja OPD berfungsi sebagai gambaran umum tingkat profesionalitas organisasi dalam memberikan layanan publik. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa organisasi mampu mengelola sumber daya secara efektif, melakukan pengukuran hasil secara objektif, dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan baik. Selain itu, peningkatan indikator ini berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, karena akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama reformasi birokrasi.

Dengan demikian, indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD menjadi tolok ukur penting dalam memastikan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mampu menjalankan mandatnya secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab sesuai prinsip *good governance*.

Pada Renstra Diskominfo 2021-2026, nilai indikator pada tahun 2025 ditargetkan BB atau secara nominal pada angka 77. Indikator kinerja 2025 pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Indikator Kinerja 2025 Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (77)	A (80,19)	104,14

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD digunakan untuk mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah. Pengukuran ini mencakup

aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta penggunaan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan. Nilai ini biasanya ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh inspektorat atau Kementerian PANRB sesuai dengan standar nasional.

Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2024, terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan 2025 Sasaran 5

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
V	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (73)	BB (73,42)	100,56	BB (77)	A (80,19)	104,14

Target akhir periode Renstra Diskominfo 2021-2026 untuk sasaran *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD* pada indikator ini diharapkan tercapai nilai A, atau secara akumulatif adalah 400. Realisasi dan tingkat capaian realisasi target Renstra adalah sebagai berikut:

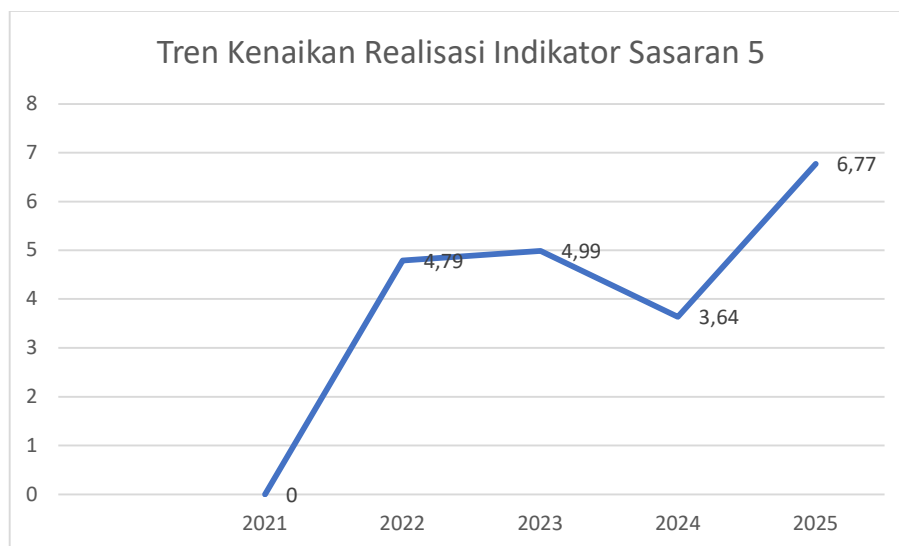
Tabel 3.17 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Sasaran 5

No	Indikator	Target Capaian Renstra 2026	Realisasi					Realisasi Capaian s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
			2021	2022	2023	2024	2025		
1		3	4	5	6	7	8	9	10=(9/3)*100%
								=4+5+6+7+8	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	400	B (60)	B (64,79)	BB (69,78)	BB (73,42)	A (80,19)	348,18	87,05

Berdasarkan tabel diatas, diperkirakan target akhir Renstra dapat dicapai sesuai dengan rencana target yang ditetapkan.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai capaian terus menunjukkan peningkatan yang fluktuatif dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,05 poin. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2025 sebesar 6,77 poin dan terendah terjadi di tahun 2024 sebesar 3,64 poin. Perkembangan nilai capaian indikator sasaran *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD* disajikan pada grafik berikut:

Grafik 3.5 Tren Kenaikan Realisasi Indikator Sasaran 5



Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

a. Upaya yang telah dilakukan Diskominfo untuk meningkatkan nilai indikator ini adalah sebagai berikut:

- Pada aspek perencanaan kinerja, Diskominfo telah melakukan penyelarasan sasaran strategis dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Tahunan
- Pada aspek pengukuran kinerja, Diskominfo telah menetapkan indikator kinerja yang terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil (outcome).
- Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan kinerja, Diskominfo telah menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pada aspek evaluasi internal, Diskominfotik secara aktif melaksanakan evaluasi dan reviu kinerja secara berkala, baik melalui rapat evaluasi kinerja maupun pendampingan internal.
- b. Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan nilai indikator ini antara lain:
- Pada aspek perencanaan kinerja, masih terdapat tantangan dalam menyempurnakan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan. Beberapa indikator kinerja belum sepenuhnya menggambarkan capaian hasil (outcome) dan dampak (impact), sehingga pengukuran kinerja belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.
 - Pada aspek pengukuran dan pengelolaan data kinerja, keterbatasan ketersediaan data yang akurat, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik masih menjadi kendala.
 - Pada aspek pelaporan kinerja, tantangan yang dihadapi antara lain masih perlunya peningkatan kualitas analisis kinerja, khususnya dalam mengaitkan capaian kinerja dengan penggunaan anggaran (value for money).
 - Pada aspek evaluasi kinerja internal, pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi belum sepenuhnya optimal. Rekomendasi hasil evaluasi kinerja pada beberapa kasus belum ditindaklanjuti secara konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya, sehingga perbaikan kinerja belum berlangsung secara berkesinambungan.
- c. Untuk meningkatkan nilai indikator ini di masa yang akan datang, Diskominfotik akan mengupayakan untuk:
- Pada aspek perencanaan kinerja, Diskominfotik akan menyempurnakan penyesuaian antara tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan agar lebih berorientasi pada hasil (outcome).
 - Pada aspek pengukuran dan pengelolaan data kinerja, Diskominfotik akan meningkatkan kualitas dan keandalan data

kinerja melalui penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi.

- Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan kinerja, Diskominfo akan memperkuat analisis capaian kinerja dengan menekankan keterkaitan antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang digunakan (value for money).
- Pada aspek evaluasi dan tindak lanjut, Diskominfo akan mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala serta memastikan hasil evaluasi dan rekomendasinya ditindaklanjuti secara konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD* adalah sebesar Rp.16.337.547.895,- terealisasi sebesar Rp.15.130.178.703,- dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 92,61%. Sisa anggaran sebesar Rp.1.207.369.192,- (7,39%) berasal dari belanja barang pakai habis yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan, sisa alokasi gaji yang dianggarkan akibat kosongnya beberapa jabatan struktural, serta dibatalkannya belanja modal yang direncanakan pada perubahan anggaran akibat ketersediaan kas daerah.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD* sebesar 104,14% dengan pagu dan realisasi anggaran sebesar 92,61% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 11,53%. Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD* antara lain mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran, serta koordinasi efektif dengan bidang-bidang.

Anggaran sebesar Rp.16.337.547.895,- berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi melalui kegiatan; (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, (6) Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sub kegiatan pada program ini mempunyai 8 (delapan) output yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD*.

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator;

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat semakin berkualitas, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan, baik internal pemerintah daerah maupun masyarakat luas. Kualitas pelayanan yang baik merupakan cerminan dari tata kelola organisasi yang profesional, kompeten, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi digunakan untuk mengukur persepsi dan penilaian pengguna atau penerima manfaat terhadap kualitas layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo. Pengukuran dilakukan melalui survei kepuasan layanan dengan menggunakan metodologi yang sesuai standar, sehingga hasilnya dapat menjadi gambaran objektif mengenai aspek-aspek pelayanan yang dinilai baik maupun aspek yang masih memerlukan perbaikan.

Penilaian terhadap tingkat kepuasan biasanya mencakup komponen-komponen pelayanan seperti kemudahan akses, kecepatan layanan, ketepatan waktu, kualitas informasi, profesionalitas petugas, fasilitas pendukung, dan kepastian prosedur. Hasil survei kepuasan ini menjadi dasar penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelayanan.

Peningkatan nilai indikator ini menandakan bahwa upaya perbaikan kualitas layanan yang dilakukan oleh organisasi, seperti penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyediaan kanal layanan yang lebih responsif, telah memberikan dampak positif bagi penerima layanan. Selain itu, indikator ini menjadi salah satu alat untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi di tingkat

perangkat daerah, khususnya pada area peningkatan kualitas layanan publik.

Secara strategis, tingkat kepuasan layanan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik, penguatan legitimasi organisasi, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam memastikan bahwa Diskominfo mampu memberikan layanan yang berkualitas, berorientasi pada kebutuhan pengguna, dan sejalan dengan prinsip pelayanan publik prima.

Pada Renstra Diskominfo 2021-2026, nilai indikator pada tahun 2025 ditargetkan 88. Indikator kinerja 2025 pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18 Indikator Kinerja 2025 Sasaran 6

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	88	89	101,14

Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2024, terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan 2025 Sasaran 6

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
VI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	92	84	91,3	88	89	101,14

Target akhir periode Renstra Diskominfo 2021-2026 untuk sasaran *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi* pada indikator ini diharapkan tercapai nilai 89, atau secara akumulatif adalah 435. Realisasi dan tingkat capaian realisasi target Renstra adalah sebagai berikut:

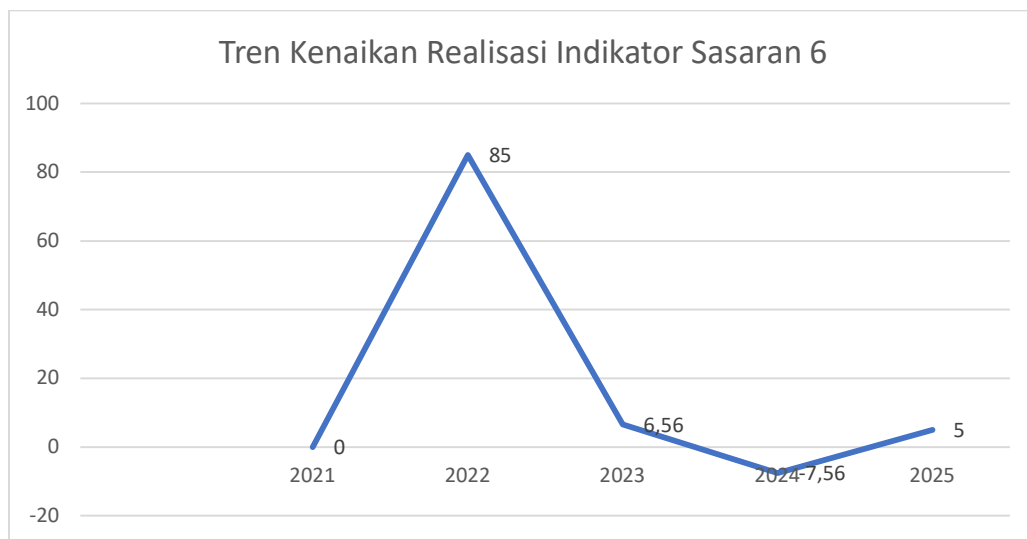
Tabel 3.20 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Sasaran 6

No	Indikator	Target Capaian Renstra 2026	Realisasi					Realisasi Capaian s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =4+5+6+7+8	10=(9/3)*100%
1	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	435	-	85	91,56	84	89	349,56	80,36

Berdasarkan tabel diatas, diperkirakan target akhir Renstra dapat dicapai sesuai dengan rencana target yang ditetapkan.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai capaian terus menunjukkan peningkatan yang fluktuatif dengan rata-rata peningkatan sebesar 22,25 poin. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 85 poin dan terendah terjadi di tahun 2024 sebesar -7,56 poin. Perkembangan nilai capaian indikator sasaran *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi* disajikan pada grafik berikut:

Grafik 3.6 Tren Kenaikan Realisasi Indikator Sasaran 6



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

a. Upaya yang telah dilakukan Diskominfo untuk meningkatkan nilai indikator ini adalah sebagai berikut:

- Dalam rangka meningkatkan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, Diskominfo telah melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur, peningkatan akses dan kemudahan layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kompetensi dan sikap pelayanan aparatur.
- Selain itu, Diskominfo secara rutin melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai dasar evaluasi dan perbaikan layanan, serta mengoptimalkan mekanisme penanganan pengaduan dan umpan balik dari pengguna layanan. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih responsif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan.

b. Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan nilai indikator ini antara lain:

- Dalam upaya meningkatkan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, Diskominfo masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah tingginya ekspektasi pengguna layanan terhadap kecepatan dan kualitas pelayanan, yang belum sepenuhnya dapat diimbangi oleh ketersediaan sumber daya dan sarana pendukung.
- Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pelayanan dan penguasaan teknologi informasi secara merata, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem pelayanan berbasis digital, turut mempengaruhi konsistensi kualitas layanan. Disamping itu, partisipasi pengguna layanan dalam pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang belum optimal juga

berdampak pada keterbatasan data umpan balik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan.

c. Untuk meningkatkan nilai indikator ini di masa yang akan datang, Diskominfo akan mengupayakan untuk:

- Untuk meningkatkan nilai indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi di masa yang akan datang, Diskominfo akan mengupayakan peningkatan kualitas dan konsistensi pelayanan melalui penyempurnaan standar pelayanan, optimalisasi layanan berbasis digital, serta peningkatan kompetensi dan sikap pelayanan aparatur. Selain itu, Diskominfo akan memperkuat mekanisme pengelolaan pengaduan dan meningkatkan partisipasi pengguna layanan dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai dasar perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi* adalah sebesar Rp.16.337.547.895,- terealisasi sebesar Rp.15.130.178.703,- dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 92,61%. Sisa anggaran sebesar Rp.1.207.369.192,- (7,39%) berasal dari belanja barang pakai habis yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan, sisa alokasi gaji yang dianggarkan akibat kosongnya beberapa jabatan struktural, serta dibatalkannya belanja modal yang direncanakan pada perubahan anggaran akibat ketersediaan kas daerah.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi* sebesar 101,14% dengan pagu dan realisasi anggaran sebesar Rp.92,61% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 8,53%. Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi* antara lain antara lain mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran, serta koordinasi efektif dengan bidang-bidang.

Anggaran sebesar Rp.16.337.547.895,- berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi melalui kegiatan; (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah, (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sub kegiatan pada program ini mempunyai 8 (delapan) output yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi*.

Rekapitulasi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,76	3,85	102,39	3,85	3,85	100
	- Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE;	3,4	3,7	108,82	3,7	3,7	100
		2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE;	3,8	3,8	100	3,8	3,8	100
		3. Indeks Domain Layanan SPBE;	4,26	4,26	100	4,26	4,26	100
		4. Indeks Domain Manajemen SPBE.	2,6	2,91	111,92	2,91	2,91	100
	- Meningkatkan Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Kemanan Informasi (KAMI)	66	81,86	124,03	82 (35)	56,54	68,95 (161,54)
- Meningkatkan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan (%)	80	92,16	115,2	93	94,87	102,01	
	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan (%)	81	90,20	111,36	91	94,87	104,25	
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	75,03	-	-		
	- Meningkatkan Penyebarluasan informasi	Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi	38,37	58,58	152,67	59	63,77	108,08

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah	Terkait Kebijakan, Program Prioritas dan strategis Pemerintah (%)						
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (73)	BB (73,42)	100,56	BB (77)	BB (80,19)	104,14
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (%)	92	84	91,3	88	89	101,14
	- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (73)	BB (73,42)	100,56	BB (77)	BB (80,19)	104,14
	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (%)	92	84	91,3	88	89	101,14

3.4. REALISASI ANGGARAN

Pada bagian ini disajikan hubungan antara Sasaran dengan Pagu anggaran dan realisasinya untuk mengetahui seberapa besar dukungan anggaran untuk masing-masing anggaran.

Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Diskominfotik 2025

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	8.338.931.719	7.961.713.340	95,48
2	Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	48.340.000	26.850.000	55,54
3	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	73.539.000	63.419.000	86,24
4	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah	5.023.368.851	4.572.044.594	91,02
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	16.337.547.895	15.130.178.703	92,61
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi			

3.5. CAPAIAN PELAKSANAAN RB GENERAL

Pada Tahun 2025, Diskominfoitik melaksanakan 3 (tiga) Kegiatan Utama (KU) antara lain:

1. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
2. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
3. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral

Adapun realisasi rencana aksi RB General yang dilaksanakan oleh Diskominfoitik pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23 Realisasi Capaian RB General

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Baseline 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,18	3,75	3,76	3,85	3,85	100
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	-	-	2	3	3	100
2	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2	3	3	3	3	100
3	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	-	1,55	2,6	2,87	2,87	100

Berdasarkan tabel diatas, tiga Kegiatan Utama pelaksanaan RB General dapat dicapai 100%. KU Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sejak tahun 2024 dilaksanakan oleh Diskominfoitik dimana sebelumnya menjadi tanggung jawab Biro Organisasi Sekretariat Daerah.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Diskominfofik pada Tahun 2025.

Proses penyusunan Laporan Kinerja terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Diskominfofik Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Dalam pencapaian kinerja Diskominfofik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala.

Sesuai Renstra Tahun 2021-2026, Diskominfofik Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) indikator tujuan dan 10 (sepuluh) indikator sasaran yang diperjanjikan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target-target capaian per tahun dari tahun 2021 s/d 2026.

4.2. UPAYA PERBAIKAN AKUNTABILITAS KINERJA DI MASA MENDATANG

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Kinerja yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Diskominfofik Provinsi Sumatera Barat, antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Diskominfofik Provinsi Sumatera Barat;

2. Keterbukaan di dalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen Laporan Kinerja;
3. Peningkatan kinerja perlu dukungan SDM, sarana dan prasarana, serta anggaran yang memadai. Masih terdapat kebutuhan Jabatan Fungsional yang belum tersedia dalam menunjang kinerja Diskominfo sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar beban kerja organisasi dapat terdistribusikan dalam kerangka matriks peran hasil.
4. Laporan Kinerja yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Diskominfo Provinsi Sumatera Barat, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dan laporan tahun berikutnya.

Padang, Januari 2026
Kepala Dinas,



Dr. Ir. Rudy Rinaldy, MT
Pembina Utama Madya/ (IV/d)
NIP. 19680624 199703 1 006



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jl. Pramuka No.11A Belanti, Padang
Website: <https://www.diskominfo.sumbarprov.go.id>
email : diskominfo@sumbarpov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. SITI AISYAH, M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

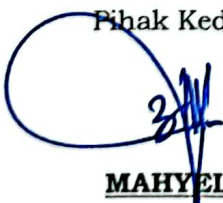
Nama : **MAHYELDI**
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Januari 2025

Pihak Kedua,

MAHYELDI

Pihak Pertama,

Ir. SITI AISYAH, M.Si.
NIP. 19670928 199203 2 002

PERJANJIAN KINERJA

**OPD/SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Sumatera Barat**

Tahun : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE; 2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE; 3. Indeks Domain Layanan SPBE; 4. Indeks Domain Manajemen SPBE	3,80 3,80 4,30 3,00
2	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	82%
3	Meningkatnya Pemanfaatan data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan	93%
		Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan	91%
4	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah	Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi Terkait Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah	59%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (77)
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	88%


No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	16.874.621.628,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	5.662.353.000,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	8.719.116.959,-	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	212.484.000,-	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	92.400.000,-	APBD
JUMLAH		31.560.975.587,-	APBD

Padang, Januari 2025

Pihak Kedua,


MAHYELDI

Pihak Pertama,


I. SITI AISYAH, M.Si.
 NIP. 19670928 199203 2 002